

**EVALUASI PENGELOLAAN PARKIR DI PASAR TENGAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Oleh
Ratih Retno Aji**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

EVALUASI PENGELOLAAN PARKIR DI PASAR TENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Ratih Retno Aji

Masyarakat Bandar Lampung Mengeluhkan pembayaran tarif parkir ganda di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Pembayaran tarif parkir ganda disebabkan banyaknya oknum parkir bayangan di sekitar Pasar Tengah. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi Pengelolaan Parkir Dipasar Tengah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian ini ialah Evaluasi pengelolaan parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung menunjukan bahwa pengelolaan parkir tidak berjalan dengan baik serta Dinas Perhubungan kurang Peduli akan juru parkir yang ada di Pasar Tengah. Perencanaan parkir dipasar tengah tidak adanya stantar operasional prosedur sehingga menjadi kendala bagi juru parkir untuk mengelola parkir. Pada saat pelaksanaan Dinas perhubungan Kurang mengawasi para juru parkir di Pasar Tengah sehingga banyak juru parkir liar yang ikut mengelola Pasar Tengah yang menyebabkan parkir di Pasar Tengah tidak tertata dengan rapi. Paska pelaksanaan pengguna jasa parkir tidak puas dengan sistem yang dibuat oleh Dinas Perhubungan dikarnakan banyak kecurangan di dalam pengelolaan parkir dan tidak ramahnya juru parkir yang berada di Pasar Tengah.

Kata kunci : Pengelolaan Parkir

ABSTRACT

EVALUATION OF PARKING MANAGEMENT IN PASAR TENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG

By

Ratih Retno Aji

Bandar Lampung Community Complains about the payment of double parking rates in Pasar Tengah, Bandar Lampung City. Payment of multiple parking rates is due to the number of shadow parking lots around Pasar Tengah. The purpose of this study was to evaluate the Central Market Parking Management of Bandar Lampung City. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. Data collection is done through interviews, document studies, and observations.

The results of this study are evaluation of parking management in Pasar Tengah Bandar Lampung City indicating that parking management is not going well and the Transportation Agency is less concerned about parking attendants in the Central Market. Parking planning in the market is in the absence of operational procedures so it is an obstacle for parking attendants to manage parking. During the implementation of the Transportation Agency Less guarded the parking attendants at Pasar Tengah so that many illegal parking attendants who participated in managing the Pasar Tengah caused parking in the Pasar Tengah to be neatly arranged. After the implementation of the parking service user is not satisfied with the system made by the Department of Transportation because there is a lot of fraud in parking management and the inability of parking attendants in the Central Market.

Keywords: Parking Management

**EVALUASI PENGELOLAAN PARKIR DI PASAR TENGAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
Ratih Retno Aji**

**Skripsi
Salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintah
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

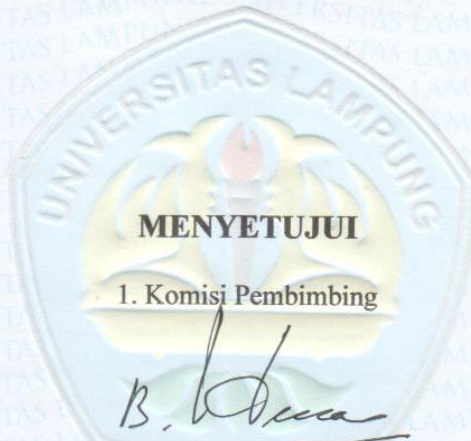
Judul Skripsi : **EVALUASI PENGELOLAAN PARKIR
DI PASAR TENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ratih Retno Aji**

No. Pokok Mahasiswa : **1416021091**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

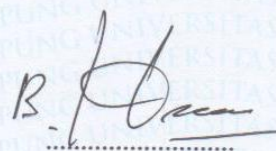
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **18 Februari 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pegarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ratih Retno aji
NPM. 1416021091

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ratih Retno Aji yang di lahirkan di Way jepara pada 13 September 1996 merupakan anak dari pasangan Bapak Baudin dan Ibu Hartati.

Jenjang pendidikan penulis di mulai pada tingkat Taman Kanak-kanak yaitu TK Pertiwi Sumberjo. Berlanjut pada Sekolah Dasar yaitu SD Negri 1 Sumberjo dan lulus pada tahun 2008.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negri 1 Way Jepara lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negri 1 Way Jepara dan lulus Pada Tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

MOTTO

“Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu saat muda”

(Dahlan Iskan)

“Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa besar kamu bisa membawa perubahan untuk orang lain”

(Michelle Obama)

“Untuk menjadi maju banyak rintangan, kecewa saat ini, tapi besok dan seterusnya harus bangkit”

(Ratih Retno Aji)

PERSEMBAHAN

Bismilahirrohmanirohin segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridho sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Bapak & mamak tercinta

Trimakasih telah, mendidik, membesarkan selalu memberikan do'a terbaik dalam sujudnya, memberi kasih sayang, dukungan dan motivasi yang tiada henti kepadaku hingga karya ini terselsaikan.

Kakak-adikku

Trimakasih atas do'a serta semangat yang telah diberikan selama menyelesaikan karya ini.

Keponakan-Keponakan

Trimkasih telah memberikan hiburan tersendiri selama menyelsaikan karya ini.

Untuk semua kluarga, sahabat dan semua orang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama ini saya ucapkan trimakasih.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi pengelolaan parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung” merupakan syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat kesalahan atau kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar dapat bermanfaat di kemudian hari.

Skripsi ini dapat terselsaikan, tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Trimakasih untuk kedua orang tuaku, Ibunda Hartati dan ayahanda Bahudin. Trimakasih atas kasih sayang yang telah Bapak dan mamak berikan kepadaku, trimakasih atas semua do'a, motivasi pengorbanan, didikan yang selama ini kalian berikan kepadaku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Trimkasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studiku.
2. Kakak kandungku Mas Wawan, mas Trio, kak Riki. Mba Sinta mba Ririn. Terimakasih telah memberikan dorongan baik materi maupun non materi selama penulis menempuh pendidikan trimakasih atas semua pengorbanan kalian yang selalu memberikan uang bulanan sampai kendaraan pribadi kalian adalah kakak terhebat yang aku punya semoga allah selalu memberikan rezeki melimpah kepada kalian. Amin ya rob.
3. Adik kandungku Enu, Aik walaupun kita jarang ketemu trimakasih selalu menghubungi lewat sosmed semoga kalian bisa menyelsaikan pendidikannya dengan baik.
4. Keponakakanku nene, nanas, naya, lea dan mino kalian adalah penghibur bagi penulis selama ini semoga kelak kalian menjadi anak soleh dan solehah serta kebanggan orang tua.
5. Bapak Dr. Syarif Makhya, M.Si., Selaku Dekan fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Lampung.

6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., Selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung sekaligus Dosen penguji skripsi. Trimakasih pak atas kritik, saran masukan serta motivasi yang telah Bapak berikan. Penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga Dosen Pembimbing utama skripsi. Trimakasih pak atas bimbingan dan motivasi serta masukan yang banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga ilmu yang telah di berikan selama perkuliahan. Penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
8. Bapak Andri Marta, S.IP. M.IP., Selaku dosen Pembimbing kedua skripsi yang telah bersedia membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi dengan memberikan saran dan koreksi yang sangat banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
9. Seluruh Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan, trimakasih banyak untuk semua ilmu yang telah di berikan kepada penulis.
10. Perempuan-perempuan setrongku yang telah menemani penulis dari masuk kuliah sampai saat ini. Miss Retno Ulandari S.IP yang udah duluan wisuda. Kamu jahat ninggalin kita.. Intan Permata Sari S.IP alhamdulillah sayy kamu kompre aku masih semprom. Miranda Oktavia cepet garab ya sayy. Trimakasih ya wanitaku udah mau menjadi bagian hidup penulis selama ini. Banyak

sekali drama dalam pertemanan ini. Semoga sampai kita tua kelak tetap menjalin silaturahmi.

11. Sahabat dari jaman SMA Dewi Handayani dan Retno Eka Larasati. Temen bolos bareng jaman SMA sebutan dimana2 Trio selamat ya bebeb kalian udah ketemu jodohnya masing-masing. Kalian adalah sahabat terbaik dimana selalu trima dengan sifat egois manja dan keras kepala diantara kalian.
12. Teman-teman seperjuangan Tika Wuri (ayo say kejer sekripsi kamuuu aku yakin mereka lama-lama akan luluh terhadapmu). Mba Lina (jangan sibuk kerja sama ngurusin lakik mba ayo kekampus katanya mw wisuda bareng. Biar kita bisa foto bareng sama-sama makek toga)
13. Temen meggunjing selama di kosan hehehe makasih ya Maya Riska sebagian hariku habis dengan kamu kamu adalah salah satu orang pembantu dalam skripsi ini dimana jaman sempro selalu minjem printer. Dimana tempat kita berpijak disitu kita mengunjing.
14. Adik rasa temen Sasti bedanya 4 tahun tapi dari jaman masih kecil jadi tempat curhat sering bobo bareng karna penulis tidak punya adik perempuan. Tapi satu tahun ini kita terpisah kamu harus kuliah di UNS dan aku masih setai di Lampung untung sudah ada sosmed jadi kita masih sering tatap muka. Jangan cepet-cepet wisuda ya sas nikmatin kuliahmu karena menjadi mahasiswa lebih bahagia dari seorang pengangguran.
15. Temen seperjuangan. Melda, Priska, Riris, Sinta, Elita, Ica, Nia, Rahmita, Depoy, Dhian Sahfitri, Bagus, Komang, Aldin, Bayu semua angkatan IP 2014 semangat ya guys kita kejar-kejaran sama angkatan 2015 nih jadi jangan kasih kendor buat selsaiin sekripsi.

16. Temen-temen KKN di Bakti Rasa Dea, Pule, Benna, Aris. Dan yang punya wilayah Sani makasih ya say kalian sudah menjadi kluaraga baru yang aku dapat selama 40 hari.

Bandarlampung, Februari2019
Penulis,

Ratih Retno Aji

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Evaluasi	12
1. Evaluasi Kebijakan.....	14
2. Tipe Evaluasi Kebijakan	15
B. Tinjauan Tentang Pengelolaan.....	18
1. Pengelolaan Parkir.....	21
C. Tinjauan Tentang Parkir	24
1. Parkir Menurut Penempatannya	25
2. Istilah-Istilah yang Digunakan Dalam Parkir.....	28
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Berjalannya Parkir.....	29
E. Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis Data	36
E. Informan Penelitian	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Pengelolaan Data	40
H. Teknik Analisis Data.....	42
I. Teknik Keabsahan Data	45

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	46
1. Profil Dan Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	46
2. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan	47
3. Tujuan Dinas Pehubungan Kota Bandar Lampung	49
4. Struktur Organisasi dan Tata kerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	50
5. Pengelolaan Wilayah Parkir	51
B. Gambaran Umum Tentang Parkir	53
C. Gambaran Umum Pasar Tengah	55

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Parkir Di Pasar Tengah	58
B. Evaluasi Proses	65
C. Pelaksanaan Parkir di Pasar Tengah	70
1. Pemungutan Retribusi Parkir	74
2. Sarana Dan Prasarana	78
D. Evalusi manfaat	82
E. Paska pelaksanaan Parkir Di Pasar Tengah	83
F. Evaluasi akibat.....	86

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Target Dan Realisasi Penerimaan PAD Dari Sektor Retribusi Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung	4
2. Daftar Informan	39
3. Daftar Pegawai Negeri Sipil UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung Menurut Golongan/ Pangkat	67
4. Daftar Nama Juru Parkir Pasar Tengah	68
5. Retribusi Parkir Tidak Berlangganan	75
6. Tarif Parkir Berlangganan	75
7. Data Inventaris UPTD Perparkiran 2011	81
8. Triangulasi Kebijakan Parkir	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	32
2. Struktur Organisasi Uptd Parkir Kota Bandar Lampung	53
3. Organisasi Upt Perparkiran Menurut Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2008.....	62
4. Struktur Organisasi Uptd Parkir Kota Bandar Lampung	62
5. Kegiatan Apel Pagi.....	70
6. Alur Penentuan Retribusi Parkir	77
7. Penarikan Ganda Tarif Parkir.....	86
8. Kondisi Parkir Di Pasar Tengah.....	91

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia melahirkan Otonomi Daerah dimana penyenggaraan Otonomi Daerah membuat setiap daerah mempunyai hak-hak dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, hak-hak tersebut antara lain mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola sumber daya daerah, memungut pajak dan retribusi daerah serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber pendapatan lain yang sah.

Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur kesejahteraan dirinya sendiri, dengan maksud dan tujuan agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta mempermudah masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di

daerahnya. Pembangunan Daerah tidak terlepas dari kebijakan dan aturan daerah serta pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Retribusi yang dikenakan jasa umum.
2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha.
3. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu.

Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten Kota.

Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum dimana retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota dari sektor dan Retribusi, memuat banyak permasalahan-permasalahan di dalamnya baik tantangan serta hambatan, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perparkiran maupun pengelolaan, seperti permasalahan Organisasi dan Manajemen yang ada di Dinas serta Unit pelaksana Teknis (UPT).

Perparkiran di pemerintah Kota Bandar Lampung, Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kebijakan, infrastruktur berupa kelengkapan dan kesiapan peralatan yang akan menopang proses kegiatan tersebut serta dari sisi kematangan kebijakan tentang perparkiran itu sendiri. Karena retribusi merupakan pendapatan daerah dan merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dalam hal ini sangat memperhatikan sekali kebijakan dan pelaksanaan Pengelolaan Parkir Daerah guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang didalamnya termasuk unsur pengelolaan parkir dan retribusi.

Pemerintah Kota Bandar Lampung, sebagai sebuah Organisasi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Penerimaan Daerah Kota Bandar Lampung bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagi laba perusahaan serta pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini adalah tabel 1 pendapatan retribusi Daerah Kota bandar Lampung yang Terkait dengan parkir di Pasar Tengah.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PAD dari Sektor Retribusi Parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	7.500.000.000	4.900.000.000	65,25%
2016	6.800.000.000	4.200.000.000	61%
2017	6.600.000.000	4.800.000.000	75,27%

Sumber : Laporan Dinas Perhubungan Daerah Kota Bandar Lampung 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa target dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di Bandar Lampung dari tahun 2015-2017 tidak pernah mencapai target menurut Kepala Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung Jamhuriyanto, S.Sos mengatakan target realisasi parkir tidak tercapai karena kurang maksimal dalam penarikan pemungutan retribusi.

Bertambahnya jumlah penduduk diiringi dengan bertambahnya kendaraan motor dan mobil, tetapi tidak diiringi perluasan jalan dan penyediaan sarana parkir yang cukup dan manajemen parkir kendaraan yang baik. Pelayanan yang memuaskan oleh petugas parkir yang di tunjuk oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung serta tidak kalah pentingnya yakni keamanan dan pertanggung jawaban dari sistem perparkiran yang ada, ditambah lagi kondisi perparkiran yang tidak tertata, kebocoran retribusi dan pajak parkir sehingga tidak masuk ke Kas Daerah.

Berdasarkan berita media *online* Dua jurai, pengelolaan parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, permasalahan yang ada di pasar tengah selalu muncul mulai dari kekurangan lahan parkir sampai pungutan biaya parkir yang cukup memberatkan pengguna jasa parkir. Adanya oknum petugas parkir yang tidak patuh dan meminta tarif parkir lebih atau tidak sesuai dengan peraturan. Pengelolaan perpajakan di pasar tengah ini di kelola oleh Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung (<http://duajurai.co/2016/08/29/lahan-parkir-pasar+tengah+terkait+lahan> diakses pada 28 mei 2018 pukul 19.40 WIB).

Permasalahan lainnya berasal dari media *online* jejamo, Pos parkir jalan Mayjen Suprpto, komplek Pasar Tengah Bandar Lampung meminta uang karcis kepada pelanggan sebesar Rp. 2.000 untuk sepeda motor. Sementara dari karcis yang di terima pengendara biaya parkir yang tertera yaitu sebesar Rp. 1.500. Kelebihan biaya sebesar Rp. 500 ini tak pernah di kembalikan penjaga parkir pada pengendara. (www.jejam0.com/pungli-parkir-pasar-tengah-bandar-lampung-mencapai-rp-225-juta-per-bulan-ini-perhitungannya.html diunduh pada tanggal 28 mei 2018 pukul 19.10 WIB.)

Sebelum Berita ini beredar luas Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang didampingi oleh Kabid Parkir dengan pengelola parkir meninjau langsung Pasar Tengah, pada Rabu 26 April 2017 pihaknya meminta kepada masyarakat untunk mengantongi nama, melaporkan serta memfoto petugas parkir yang meminta biaya parkir ganda. Selain itu Dinas Perhubungan akan memasang *benner* pembayaran parkir

disetiap pos parkir, didalam *banner* tersebut akan tertulis tarif parkir agar tidak terjadi pemungutan ganda. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Lembaga Teknis yang ada (UPT Perparkiran, merupakan unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Dinas Perhubungan), sebagai organisasi Pemerintah yang menangani permasalahan dan kebutuhan warga Kota terhadap penyediaan sarana dan prasarana parkir.

Kebijakan serta strategi diterapkan untuk melaksanakan program-program kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perparkiran kendaraan seperti yang dilakukan di tepi jalan umum, pusat-pusat pertokoan, hiburan, pasar serta pusat keramaian lainnya, dengan maksud meningkatkan PAD dan pelayanan ke pada masyarakat serta menciptakan ketertiban.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang mengkaji mengenai evaluasi pengelolaan parkir. Sebelumnya penelitian mengenai parkir sudah banyak dilakukan untuk mengetahui pengelolaan parkir, upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi parkir, Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir maupun yang lainnya. Oleh sebab itu, penulis berusaha mengkaji keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa yakni mengenai pengelolaan parkir. Adapun penelitian terdahulu yang juga mengangkat topik mengenai pengelolaan parkir adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung

Penelitian ini dilakukan oleh Jazuli Wijaya. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sektor dan Retribusi, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perparkiran maupun pengelolaan Pendapatan retribusi itu sendiri.

Teori yang dipakai adalah Charles O.Jones, Mengimplementasikan kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersifat eksploratif.

2. Studi Optimalisasi Fasilitas Parkir di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung.

penelitian ini dilakukan oleh Maulana Rendri Yuda dkk. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kendaraan dan durasi parkir kendaraan motor maupun mobil. Dari hasil pengamatan dan pencatatan data yang dilakukan pada survey pendahuluan tersebut, adanya kendaraan yang parkir di bahu jalan yang bukan termasuk area parkir serta kendaraan yang parkir di dalam daerah parkiran FKIP belum sepenuhnya parkir pada tempat dan posisi yang seharusnya.

Teori yang digunakan adalah teori Putra (2015). Fasilitas parkir dibangun bersamaan dengan tujuan untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Parkir juga bisa di definisikan sebagai setiap

kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.

3. Kebijakan Pemerintah Kota Metro Dalam Pengalih fungsian Jalan Umum Menjadi Lahan Parkir. Penelitian ini dilakukan oleh Clara Yolanda. Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah Kurangnya lahan yang sering terjadi di jalan raya baik dari segi keadaan jalan maupun kurangnya tempat parkir yang kemudian Kebijakan Pemerintah Kota Metro Dalam Pengalih fungsian Jalan Umum menjadi Lahan Parkir.

Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 pada Pasal 5 menyebutkan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Metro meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang dan pengembangan kawasan strategis.

4. Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Metro (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Metro). Penelitian ini di lakukan oleh Riski Atika Sari. Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah parkir liar di tepi jalan umum Kota Metro yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya

lahan parkir tepi jalan umum yang terbatas karena adanya ketentuan untuk parkir tepi jalan umum, petugas parkir yang memanfaatkan lokasi parkir ilegal, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Peneliti menggunakan analisis SWOT dalam penelitiannya dengan mempertimbangkan kecocokan antara masalah yang diteliti dengan konsep yang digunakan. Dengan analisis SWOT peneliti dapat menguraikan Faktor S, W, O, T dalam mengkaji parkir liar. Setelah itu dapat dianalisis dan ditentukan strategi yang dapat digunakan dalam menanggulangi parkir liar.

5. Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Bandar Lampung 2015). Penelitian ini dilakukan oleh Rezki Anantama. Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah Kota bandar lampung sebagai salah satu daerah yang mengelola retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini belum maksimal dalam merealisasikan target yang ingin dicapai. Hal ini berdasarkan data pada tahun 2015 dimana dari target Rp. 6.600.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 5.128.277.000.

Teori yang digunakan adalah teori G.R. Terry dalam Hasibuan (2009:38) yaitu: 1. Perencanaan (*planning*) sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. 2. Pengorganisasian (*organization*) sebagai cara

untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. 3. Penggerakan (*actuating*) sebagai penggerak organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing 4. Pengawasan (*controlling*) sebagai pengawas apakah gerakan dari organisasi sudah sesuai dengan rencana atau belum.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengevaluasi pengelolaan parkir dimana terjadi pembayaran ganda saat memasuki area parkir.

Selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis bermaksud untuk mengevaluasi pengelolaan parkir di Pasar Tengah Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut : Bagaimanakah Evaluasi Pengelolaan Parkir Dipasar Tengah Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah, untuk mengevaluasi Pengelolaan Parkir Dipasar Tengah Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil yang dicapai pada penelitian ini dapat memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ataupun sudut pandang baru. Selain itu, dapat dijadikan sebagai tambahan literatur penunjang pembelajaran mata kuliah yang berkaitan dengan Evaluasi maupun sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa yang penelitiannya mengenai Evaluasi Parkir atau sejenisnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan, serta ide dalam mengimplementasikan kebijakan perparkiran khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Lembaga Pelaksana Teknis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Evaluasi

Secara umum evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Menurut Arikunto dan Cepi (2014:1) Evaluasi adalah *To Find Out, decide The Amount Or Value* artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara baik, bertanggung jawab, menggunakan metode ataupun strategi yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang berjalannya suatu pekerjaan, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurut Winarno (2007 : 144) Implementasi Kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program.

Pendapat Wirawan (2011: 7) evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi dengan membandingkannya indikator evaluasi dan hasil yang dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Sukardi (2014:1) evaluasi adalah proses mencari data atau informasi tentang objek atau subjek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap subjek ataupun objek tersebut.

Selanjutnya Wirawan (2012:17) mengelompokkan evaluasi menjadi 3 bagian yang berbeda yaitu:

1. Evaluasi Proses (*process evaluation*) yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani.
2. Evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.

3. Evaluasi akibat (*impact evaluation*) dimana melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut.

Dari definisi tentang evaluasi tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah mengambil dan mengolah data kemudian hasilnya dibuat keputusan. Peneliti sependapat dengan pendapat Wirawan karena menjelaskan secara terperinci mulai dari pengumpulan data, analisis, penyajian, penilaian, serta pengambilan keputusan.

1. Evaluasi kebijakan

Menurut Winarno (2008:225) evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. Pada dasarnya, kebijakan dijalankan dengan maksud tertentu.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Menurut Anderson (1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut *W. Dunn*, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan klarifikasi kritik penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

2. Tipe evaluasi kebijakan

James Anderson (1979) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe:

- a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut perihal kepentingan (*interest*) dan ideologi dari kebijakan.
- b. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
- c. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. (2000) membagi evaluasi menjadi :

1. Evaluasi Proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi
2. Evaluasi Impak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil atau pengaruh dari implementasi kebijakan
3. Evaluasi Kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki
4. Evaluasi Meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu

Howlet dan Ramesh (1995) dalam William Dunn, ada 3 macam Evaluasi Kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi Administratif Yang berkenaan dengan evaluasi sisi *administrative* anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
 - a. *Effort evaluation*, yang menilai dari sisi *input* program yang dikembangkan oleh kebijakan.
 - b. *Performance evaluation*, yang menilai keluaran *output* dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
 - c. *Adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan.

- d. *Efficiency Evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
- e. *Process Evaluation*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

2. Evaluasi Judisial

yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.

3. Evaluasi Politik

yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstitusi politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Menurut PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

1) Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*)

Evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*)

Evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*)

Evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai *efisiensi* (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), *efektivitas* (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Kesimpulan bahwa teori evaluasi yang di pakai dalam penelitian ini adalah teori wirawan (2012:17) mengelompokkan evaluasi menjadi 3 bagian yang berbeda yaitu: 1. Evaluasi Proses 2. Evaluasi manfaat 3. Evaluasi akibat dengan memperhatikan PP No 39 Tahun 2006 yaitu 1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*) 2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*) 3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*).

B. Tinjauan Tentang Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan mengubah sesuatu sehingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan untuk melakukan sesuatu agar

lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat atau sebagai suatu rangkaian pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah. (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sukanto (1989:20) mendefinisikan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Sukanto pada dasarnya menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya mengenai pengertian pengelolaan Pamudji (1985:7) mengemukakan sebagai berikut Perkataan pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna pembaharuan, yaitu

melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya Atmosudirdjo (2005:160) mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian Atmosudirdjo menitik beratkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Sedangkan Terry (2006:9) mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengolahan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. **Pengelolaan Parkir**

Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan parkir di suatu area property, dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut. Sebagian besar (*vendor*) mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran atau pelataran parkir. Perusahaan ini dibayar atas dasar jumlah transaksi yang dilakukan ataupun berdasarkan persentase pendapatan yang diperoleh yang berkisar antara 2 sampai 5 %.

Pada awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perusahaan daerah, kemudian mulai berkembang pelataran dan gedung parkir yang juga dikelola oleh pemerintah daerah. Karena pengelola biasanya tidak efisien akhirnya pengelolaan mulai dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan saat ini diberbagai lokasi parkir umum. Perusahaan biasanya menggunakan alat bantu pencatatan dan perhitungan biaya yang dikelola dengan bantuan komputer basis data, sehingga kekeliruan pencatatan dapat dihilangkan serta mempersulit pencurian kendaraan.

Pengelolaan parkir dipasar, pasar merupakan sentra pembelanjaan yang dikunjungi oleh banyak orang menyebabkan banyak kendaraan terparkir diarea umum , dimana para pengeloaan parkir harus menjaga dan mengatur perparkiran dengan sebaik mungkin sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 102 :

- a. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dan diluar ruang milik jalan :
 1. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan setandar teknik yang di tentukan.
 2. Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir kusus.

3. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas.
 4. Menjaga keamanan kendaraan yang terparkir.
 5. Memberikan tanda bukti dan tempat parkir.
 6. Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengguna jasa parkir yang telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- c. Standar teknik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi
1. Kebutuhan ruang parkir.
 2. Persyaratan satuan ruang parkir.
 3. Komposisi peruntukan.
 4. Alinyemen.
 5. Kemiringan.
 6. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki.
 7. Alat penerangan.
 8. Sirkulasi kendaraan.
 9. Fasilitas pemadam kebakaran, pengaman dan keselamatan.

C. Tinjauan Tentang Parkir

Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya. Sehingga tempat-tempat terjadinya suatu kegiatan misalnya seperti tempat kawasan pariwisata diperlukan areal parkir. Pembangunan sejumlah gedung atau tempat-tempat kegiatan umum sering kali tidak menyediakan areal parkir yang cukup sehingga berakibat penggunaan sebagian lebar badan jalan untuk parkir kendaraan (Warpani, 1990).

Menurut Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998 parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang. PP No.43 tahun 1993 menjelaskan definisi parkir adalah suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu atau tidak bersifat sementara.

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Poerwadarmita (1976), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
2. Pignataro (1973) dan Sukanto (1985) menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.
3. Dijelaskan dalam buku peraturan lalu lintas (1998) pengertian dari parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.
4. Warpani (1988) Parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu
5. Sedangkan menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

1. Parkir Menurut Penempatannya

Dikutip dari <http://www.galeripustaka.com> yang di akses pada tanggal 16 september 2018 pukul 19.00 WIB menjelaskan parkir menurut penempatannya.

a. Parkir di jalan (*on street parking*)

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan tetapi kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir.

b. Parkir di daerah perumahan akibat dari terus meningkatnya volume kendaraan di jalan serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai parkir mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya terdapat *disbenefit*/kerugian dari tidak tertatanya parkir disepanjang trotoar jalan, namun hal tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat adanya parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi penghuni di sekitar jalan tersebut.

Terlebih lagi perumahan di pinggiran kota dimana masih tersedia ruang untuk parkir, dan parkir di jalanpun dapat dilakukan. Namun pada daerah pemukiman yang berada dekat dengan pusat kota, kontrol tersebut tetap diperlukan jika kondisi transportasi tetap efektif. Terdapat dua cara kontrol terhadap sistem parkir ini yaitu parkir gratis bagi penghuni (dengan menempelkan tanda tertentu yang dapat berupa stiker dan ditempelkan di kendaraan) dan bayaran dengan kartu yang dicap harian.

c. Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*)

Pada parkir jenis ini terdapat 4 macam alternatif cara parkir kendaraan yaitu:

- 1) Paralel terhadap jalan
- 2) Tegak lurus terhadap jalan
- 3) Diagonal atau membentuk sudut terhadap jalan
- 4) Di tengah jalan yang cukup lebar, baik secara diagonal maupun tegak lurus terhadap jalan.

Jalan yang tidak terlalu lebar, dapat digunakan sistem paralel. Sistem diagonal sebenarnya dapat menampung lebih banyak mobil tetapi untuk itu disepanjang pinggiran jalan harus diperkeras. Parkir diagonal memang tidak umum, namun sebenarnya dapat menampung lebih banyak kendaraan. Di sisi lain, cara ini juga akan banyak mengurangi lebar jalan.

Kesulitan lainnya adalah waktu untuk keluar dari areal parkir (*manuver*) yang akan memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan sistem parkir paralel. Sampai dengan saat ini nampaknya parkir parallel dirasakan paling tepat karena selain tidak terlalu banyak memakan tempat untuk *manuver* juga jauh lebih sedikit mengambil lebar jalan dan kecil kemungkinan menyebabkan kecelakaan (Pusdiklat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998).

2. Istilah-Istilah Yang Digunakan Dalam Parkir

- a. Kapasitas Parkir : Kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam satu-satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.
- b. Kapasitas Normal : Kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.
- c. Durasi Parkir : Lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
- d. Kawasan Parkir : Kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- e. Kebutuhan Parkir : Jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan

kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.

- f. Lama Parkir : Jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari.
- g. Puncak Parkir : Akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
- h. Jalur Sirkulasi : Tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- i. Jalur Gang : Merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- j. Retribusi Parkir : Pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Berjalannya Parkir

Menurut Bapak Afruly, selaku kepala bidang bagian Umum (Dinas Perhubungan) terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di Pasar Tengah. Faktor penghambat terhadap pelaksanaan Pengelolaan parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, antara lain :

1. Faktor Pendukung

a. Kedisiplinan dari juru parkir. Para juru parkir yang telah direkrut oleh Dishub ini mampu menerapkan kedisiplinan. Baik dari segi kinerja maupun pertanggungjawabannya terhadap koordinator lapangan (korlap), sehingga mampu menyetorkan retribusi sesuai dengan target.

b. Kedisiplinan para pengumpul. Kinerja juru parkir yang baik akan mempengaruhi kinerja pengumpul.

c. Titik parkir yang tertata rapi dan tertib. Dengan titik parkir yang tertata rapi dan tertib maka Dishub dapat menghitung dengan jelas besarnya potensi parkir di titik tersebut.

d. Kondisi parkir yang kondusif. Kawasan parkir yang bebas dari orang-orang yang tidak bisa dikendalikan (preman) melancarkan proses pemungutan retribusi.

e. Kesadaran masyarakat terhadap tertib lalu lintas dan tertib parkir sehingga tidak menimbulkan parkir liar. Karena parkir liar mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kurangnya kesadaran berlalu lintas yang baik oleh masyarakat.

2. Faktor Penghambat

a. Adanya pihak luar yang tidak dapat dikendalikan dan ikut campur dalam masalah parkir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sektor parkir merupakan salah satu sektor favorit bagi preman. Bukan hanya

di Lampung tapi juga di setiap kota termasuk yang terparah ibukota Jakarta.

b. Kurangnya kesadaran bagi juru parkir. Sebagian juru parkir belum sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Secara prakteknya banyak juru parkir yang kucing-kucingan dengan pengumpul.

c. Adanya parkir liar yang bilamana tidak segera ditindak akan sulit untuk ditertibkan.

E. Kerangka Pikir

Ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya. Untuk itu penelitian yang akan dilakukan ini, mengutip Peraturan Pemerintah yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam. Didalam Penelitian ini, penulis mengambil studi kasus yang ada di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.

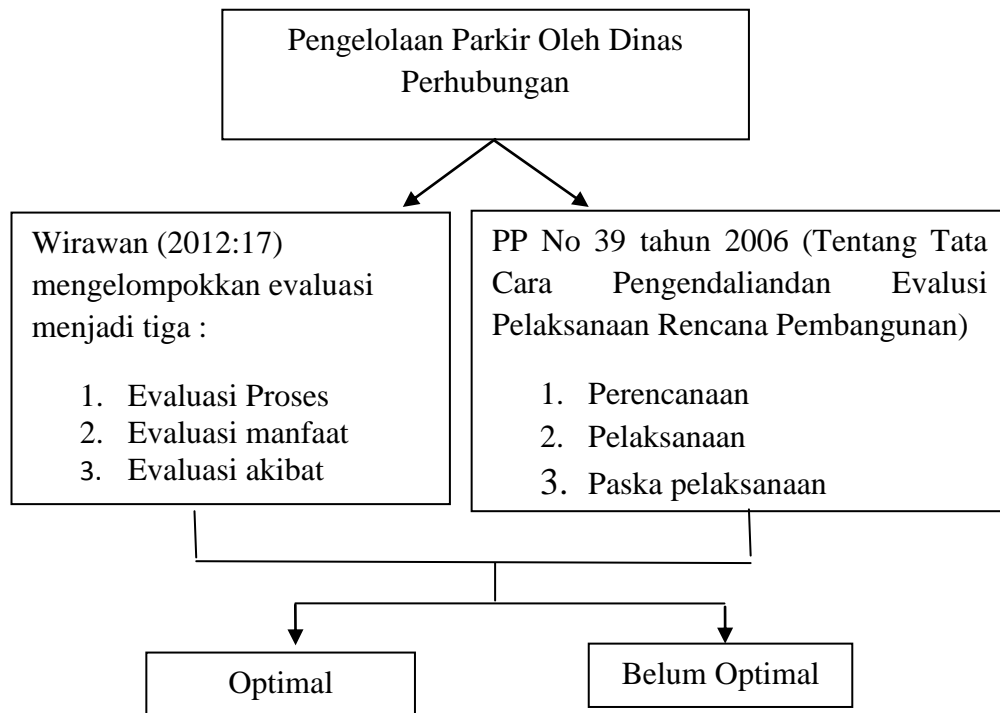
Pengelolaan parkir masih tidak teratur atau belum tertata rapih masih banyak juru parkir bayangan yang ikut terjun langsung dalam parkir di pasar tengah. Untuk mengetahui pengelolaan parkir di Kota Bandar Lampung khususnya Pasar Tengah dapat dilihat dengan mengidentifikasi setiap permasalahan dalam pengelolaan parkir. Sesuai dengan teori Wirawan (2012:17) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga yaitu : 1. Evaluasi Proses 2. Evaluasi manfaat, 3. Evaluasi akibat dengan

memperhatikan konsep Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Di dalam menangani pengelolaan parkir di Pasar Tengah Dinas Perhubungan dapat menjalankan perannya yang sesuai dengan hak, kewajiban, kedudukan dan fungsinya sebagai pemimpin di Pengelolaan Parkir Pasar tengah. Dinas Perhubungan Dapat melakukan beberapa cara seperti pengawasan dan pengendalian parkir. Tentunya semua kegiatan haruslah sesuai dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Untuk memudahkan penulis melakukan penelitian, maka selanjutnya penulis membuat bagan kerangka pikir, sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber : Diolah Peneliti 2018

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang pengelolaan parkir yang difokuskan pada pengelolaan parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.

Dasar penelitian yang dilakukan ini yaitu melalui pengamatan dan pengkajian untuk memperoleh data tentang berbagai fenomena yang berhubungan dengan pengelolaan parkir sehingga mendapat data yang obyektif dalam rangka memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang menyangkut pengelolaan parkir di Pasar Tengah. Metode penelitian ini digunakan karena berdasarkan pada objek penelitian yang membutuhkan pengamatan yang cermat dan mendalam berdasarkan peraturan pemerintah dan fakta-fakta yang timbul dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan waktu penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi dan waktu yang diambil akan membantu peneliti untuk memahami masalah penelitian. Adapun waktu dalam penelitian ini, yakni selama bulan Oktober 2018. Menurut Herdiansyah (2012:56) memaparkan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang akan dijadikan sasaran dalam proses pengambilan data.

Lokasi Penelitian didasarkan pada masalah yang terjadi dilapangan. Lokasi terkait penelitian ini adalah Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Daerah tersebut diambil sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat sehingga banyak kendaraan yang terparkir di Pasar Tengah.

C. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus (Moleong,2014:92-93). Fokus penelitian merupakan masalah pokok yang menjadi sasaran utama dalam sebuah penelitian ilmiah. Pada dasarnya, fokus penelitian dapat bersumber dari pengalaman penulis sendiri, berita yang sedang hangat dibicarakan ataupun melalui kepustakaan ilmiah. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.

Peneliti kualitatif menetapkan fokus guna mempertajam penelitian. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Spradley dalam Sugiyono (2014:208-209) menyatakan bahwa “ *A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*”.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah pengelolaan parkir di Pasar tengah Kota Bandar Lampung. Sehingga, berdasarkan tinjauan secara teoritis yang sebelumnya telah penulis paparkan, penulis menggunakan beberapa pendapat para ahli dan Peraturan Pemerintah untuk memahami faktor pendukung dan penghambat pengelolaan parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.

Dalam Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

1) Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*)

Evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*)

Evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*)

Evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai *efisiensi* (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), *efektivitas* (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

D. Jenis Data

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan penelitian. Sumber data merupakan *natural setting* dalam memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel, koran dan lain-lain.

Menurut Sugiyono (2012:225) sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung berasal dari informan dengan tujuan

memberikan data yang akurat kepada peneliti. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara antara peneliti dan informan, wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara mengenai pengelolaan parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu penerimaan retribusi parkir dari tahun 2015-2017 diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Pemberitaan media *online* seperti www.jejamo.com, / dua.jurai.co.id.

E. Informan Penelitian

(Moloeng, 1989:132) Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi informan atau anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Moleong (2002:90) dalam hal ini memberikan dua cara untuk dapat menemukan informan yaitu melalui keterangan orang yang berwenang baik secara formal ataupun informal, serta melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Agar memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Informan yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian.
2. Informan yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan.
4. Informan yang berada pada sasaran penelitian.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling untuk pengelola parkir yakni dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan teknik eksidental untuk pengguna jasa parkir. Berikut kriteria-kriteria informan yang ditentukan dalam penelitian ini :

Tabel 2. Daftar Informan

NO	Nama	Jabatan
1	Afrully, S.Sos., M.M	Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
2	Ahmad Roni Skill, S.E., M.M	Kasi Pendapatan
3	Danang Kurniawan	Juru Parkir Di Pasar Tengah
4	Benni	Petugas Parkir Di Pasar Tengah bukan Dari dinas atau petugas parkir bayangan
5	Winda	Masyarakat Pengguna parkir di Pasar Tengah
6	Maya	Masyarakat Pengguna parkir di Pasar Tengah
7	Dian	Masyarakat pengguna parkir di Pasar Tengah

Sumber : Diolah Peneliti 2018

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,2014:224). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) (Sugiyono,2014:225). Oleh sebab itu, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna mendapatkan sejumlah informasi yang di butuhkan, di antaranya :

1. Observasi

Merupakan pengamatan secara langsung di lapangan terkait dengan pengelolaan perparkiran di Pasar tengah Kota bandar Lampung oleh aktor formal yakni para juru parkir yang terdaftar dalam Dinas Perhubungan Kota dan juga praktik parkir liar oleh aktor informal

yakni para juru parkir yang tidak terdaftar. Pengamatan di lapangan ini. Selain itu pula dilakukan observasi kepada Dinas Perhubungan terkait kebijakan pengelolaan perparkiran yang seharusnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

2. Wawancara

Menggunakan bentuk *interview* terstruktur, dengan membuat *interview guide* berisikan topik-topik yang ditanyakan kemudian dielaborasi. *Interview* guide diturunkan dari logika berfikir yang dibangun dalam penelitian ini. Pemilihan responden dengan menggunakan teknik *snowball effect*. Mewawancarai responden pertama kemudian melakukan interview dengan *responden* lain yang berkaitan dengan responden pertama, dan seterusnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping, artikel. Rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, data survei, dan daftar nama. Dalam penelitian ini mencari dokumen berupa Peraturan parkir Selain itu pula berisikan dokumentasi hasil observasi di lapangan dan perekaman hasil wawancara.

G. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data sangat penting bagi sebuah penelitian karena dengan adanya pengolahan data, suatu penelitian akan mudah untuk dipecahkan dari hasil yang di dapat dari lapangan. Setelah data yang diperoleh dari

lapangan terkumpul, maka tahapan selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini menurut Singarimbun dan Sofyan Efendi (2006:14) adalah sebagai berikut:

1. Pengeditan Data (*Editing*)

Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Dalam tahap ini meneliti kembali data-data yang telah terhimpun untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan data, kesesuaian data jawaban dan keseragaman satuan data. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara penyisipan data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis.

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian, melakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data yang telah ada untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data ialah pemberian pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data. Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melalui tahap editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi data dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna kemudian dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi.

H. Teknik analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami serta dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data menurut M. Nasir (1999 : 419) adalah suatu kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi data serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisa data kualitatif menurut Milles dan Huberman (1992:16-19) meliputi tiga komponen analisa yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi yaitu proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Sehingga, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Reduksi data dalam penelitian dilakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini peneliti memilih kata-kata yang dapat digunakan untuk melakukan pembahasan dan membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data yaitu menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari hasil lokasi penelitian. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang di teliti baik secara keseluruhan maupun parsial.

Hasil reduksi data di susun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk memudahkan pembaca memahami secara praktis.

3. Kesimpulan (Verifikasi data)

Kesimpulan yaitu tahap akhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenarannya, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsisten dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah di pahami sesuai tujuan penelitian.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu (Moleong 2007:330). Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu :

1. Triangulasi data peneliti menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen arsip Dinas Perhubungan Kota bandar Lampung, serta berita *online*.
2. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang di lakukan oleh Dinas perhubungan penjaga parkir baik dari dinas perhubungan maupun penjaga parkir bayangan serta pengguna jasa parkir.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

1. Profil Dan Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) nomor 12 Tahun 2000 tentang organisasi Dinas-Dinas Daerah, tentang setruktur organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Sebelum memiliki nama Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dinas ini awalnya bernama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dinas LLAJ) berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 1995. Uraian singkat mengenai sejarah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada regenerasi kepemimpinan yang terjadi. Regenerasi tersebut dapat diamati dibawah ini :

- a. Tahun 1981-1994 Cabang Dinas LLAJ Kota Madya Bandar Lampung di pimpin oleh Bapak I Nengah Madra, S.H
- b. Tahun 1994-1997 Cabang Dinas LLAJ Kota Madya Bandar Lampung Dipimpin oleh Bapak Darwis Ali, S.H
- c. Tahun 1997-2001 Dinas LLAJ Bandar Lampung Dipimpin oleh Drs. Zainal Fanani Idris

- d. 2002-2004 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dipimpin Oleh Drs. Zainal Abidin Hasan
- e. Tahun 2005-2006 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dipimpin oleh Ruslan HD, S.E
- f. Tahun 2006-2010 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Ir. Eddy D. Saleh
- g. Tahun 2010-2012 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. Normansyah, M.Si
- h. Tahun 2012-2015 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Rifa'I, S.H
- i. Tahun 2015-2016 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh I. Kadek Sumarta, S.Sos. M.M
- j. Tahun 2016 sampai saat ini Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Ir. Ibrahim, MM

Sumber : Dinas perhubungan kota Bandar Lampung 2018

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi bagian dari perencanaan yang setrategis suatu langkah penting dalam perjalanan Dinas. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya tetapi juga pada kehidupan

Dinas selanjutnya. Kehidupan Dinas sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi Dinas juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah “Penyelenggaraan Sistem Transportasi yang Berkualitas” arti visi tersebut adalah terwujudnya transportasi perkotaan yang terpadu, aman nyaman, dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang maju dan moderen.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang di tetapkan agar tujuan Dinas dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah di tetapkan dan tugas yang harus di laksanakan oleh Dinas perhubungan, telah disusun pula misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama kearah mana perencanaan atau program Dinas yang ingin dicapai.

Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah :

- a. Mewujudkan Sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi
- c. Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi
- d. Meningkatkan kordinasi antara instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi

- e. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah sektor transportasi

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

3. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Tinjauan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai implementasi dari misi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku sumber Daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung melalui pendidikan dan pelatihan teknis sub sektor perhubungan maupun diklat dan pelatihan lainnya.
- b. Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta keancara transportasi.
- c. Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang).
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan program perencanaan pusat dan daerah dalam sektor transportasi.
- e. Menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada maupun potensi pendapatan yang belum dapat di maksimalkan dari sektor transportasi.

4. Struktur Organisasi dan Tata kerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

UPTD Perparkiran merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang bertugas untuk menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Struktur Organisasi UPTD perparkiran Kota Bandar Lampung dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 tahun 2009, terdiri dari :

a. Kepala UPT

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan di bidang Perparkiran. kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2008).

b. Sub bagian Tata Usaha

Bagian Tata usaha di kepalai oleh sekretaris, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan Perencanaan , Program kerja UPT, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan , menyiapkan surat ketetapan retribusi parkir/ karcis parkir, pengelolaan urusan keuangan, surat menyurat, kepegawaiaan dan urusan rumah tangga, mengadakan penelitian dan pengembangan perparkiran.

c. Urusan Pendapatan dan Pengawasan

Dalam melaksanakan kegiatan Organisasi, urusan pendapatan dan pengawasan mempunyai tugas yakni :

1. Membantu Kepala UPT dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendapatan retribusi parkir dan pengawasan perparkiran.
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam hal pembinaan dan penugasan petugas parkir.
3. Melaksanakan pembukuan hasil setoran retribusi parkir serta menyajikan laporan secara berkala tentang penerimaan retribusi parkir.
4. Melaksanakan pengawasan tertib kegiatan pengelolaan perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan tempat perparkiran

5. Pengelola Wilayah Parkir

Pengelola wilayah parkir mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Kepala UPT dalam memimpin dan koordinasi kegiatan pemungutan retribusi parkir.
2. Mengelola dan mengakomodir kegiatan-kegiatan dalam pemungutan retribusi parkir serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT perparkiran.

Dalam melaksanakan kinerja UPT Perparkiran, Kepala UPT, Sub bagian Tata Usaha, dan pengelola wilayah melakukan kordinasi dan sinkronisasi kedalam maupun keluar satuan organisasi dengan bidang tugas masing-masing. Susunan Personalia Unit Pelaksana Teknis Parkir di dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Berikut :

1. Kepala UPT Perparkiran : Afrully Rahmat. AT., S.Sos.,MM

2. Subbagian Tata Usaha

Kasi Pendataan : Muhaimin., ST., MM

Kasi pengawasan dan ketertiban : Hartono Ali., SE., MM

Kasi Pendapatan : A. Rono Skil., SE., MM

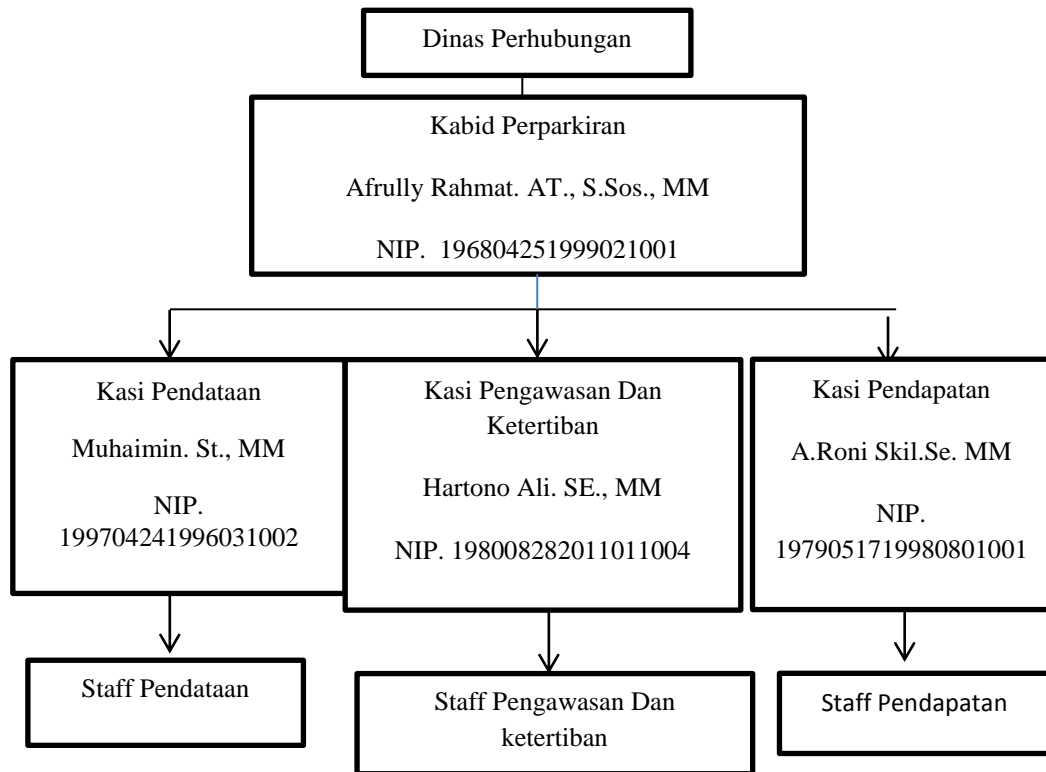
3. Staff Pendataan

4. Staff Pengawasan dan ketertiban

5. Staff Pendapataan

UPT parkir diatas yang melaksanakan berbagai kebijakan dan implementasi di lapangan berkaitan dengan perparkiran. Berikut ini gambar Struktur Organisasi UPTD Parkir Kota Bandar Lampung sesuai Peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2008.

Gambar 2. Struktur organisasi UPTD parkir Kota Bandar Lampung



Sumber: Diolah dari UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung, Tahun 2018

B. Gambaran Umum Tentang Parkir

Pada tahun 1976 parkir di di kelola oleh swasta yakni PT. Uber Tehnisi Indonesia, dimana hal ini berdasarkan surat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung dari tahun 1976 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1981 pada masa kepemimpinan Bapak Thabrani Daud. Sejak tanggal berakhirnya perjanjian tersebut pengelolaan parkir kembali dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1981 Tentang Pedoman pengelolaan Parkir di Daerah tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung pada masa kepemimpinan Bapak Drs. Syarif Zulkanain Subing.

Sebelum menjadi UPTD Perparkiran di bawah Dinas Perhubungan Bandar Lampung, UPTD Perparkiran bernama Badan Pengelola Perparkiran BP. Parkir, dimana hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1988 Tentang Pengelolaan Perparkiran dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Kemudian dalam perjalanannya dikeluarkan dan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 102.

Pada Tahun 2000, Kota Bandar Lampung mulai menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan membuat Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. Pada Tanggal 7 february 2001, Badan Perparkiran berubah nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dan bergabung dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Hal ini di dasari oleh Keputusan Walikota Nomor 33 Tahun 2001 dan diperkuat dengan keputusan Walikota Bandar Lampung nomr 12 tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung .

Di awal tahun 2009, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran berubah nama menjadi Unit Pelaksana teknis Perparkiran Kota Bandar Lampung . Unit Pelaksan Teknis Perparkiran mempunyai tugas oprasional dalam bidang perparkiran, hal ini berdasarkan PP No 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

C. Gambaran Umum Pasar Tengah

Pada hari Senin, 15 Maret 1993 adanya kesepakatan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk kontrak bagi tempat usaha yang ada di Kelurahan Gunungsari Kecamatan Tanjung Karang Pusat, yang disebut dengan Pasar Tengah. Adanya kesepakatan antara John Firdaus, Direktur Utama PT. Bangun Tata Lampung Asri dengan Suharto, Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

John Firdaus meminta izin usaha kepada Suharto, untuk melaksanakan pekerjaan proyek di atas tanah milik Suharto, yang terletak di Bandarlampung Jalan Teuku Umar, Jalan Kotaraja, Jalan Palembang I, II, III, dan Jalan Padang. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pekerjaan pembangunan pertokoan pasar tengah tanjungkarang bagian utara, berupa bangunan susun/bertingkat (rumah toko/ruko) sebanyak 74 unit dengan seluas tanah 4.274 M² yang berada dalam penguasaan pemerintah kotamadya daerah tingkat II Bandar Lampung yang terletak di kelurahan gunungsari kecamatan Tanjung Karang pusat kotamadya daerah tingkat II Bandarlampung.

Pasar Tengah terletak di tengah-tengah kota Bandar Lampung, yang mana sebelah utara berbatasan dengan Plaza Pos, sebelah selatan berbatasan dengan Simpung Centre dan kawasan pemukiman Gunung Sari,

sebelah barat berbatasan dengan kawasan Pasar Bambu Kuning, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Ramayana dan Pasar Bawah. Pasar Tengah terdiri dari beberapa blok jalan yang berdampingan dimana setiap jalan terdapat toko-toko atau ruko-ruko yang menjual berbagai macam kebutuhan sehingga menjadi suatu wilayah perdagangan.

Dari arah pintu masuk selatan di samping Plaza Pos disebut dengan jalan Padang, lalu disebelahnya terdapat jalan Palembang I, bersebelahan lagi dengan jalan Palembang II yang berdampingan dengan jalan Baru, bersebelahan lagi dengan jalan Sibolga, jalan Tanjung Pinang, jalan Bengkulu, jalan Pemuda dan yang terakhir yaitu jalan Pangkal Pinang. Pasar Tengah sejak dahulu telah menjadi tujuan kunjungan belanja. Dengan jajaran pertokoan beragam jenis kebutuhan, mulai dari sembako, pakaian, hingga peralatan elektronik tersedia di Pasar Tengah.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan hasil penelitian tentang evaluasi pengelolaan parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*) Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengelola parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan baik karena disini belum adanya SOP.
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*)
Dalam pelaksanaan tugas pokok yang telah diberikan pengelolaan parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Hal ini dilihat dari banyaknya oknum luar yang ikut dalam sistem pengelolaan parkir di Pasar Tengah.
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*)
Setelah di laksanakan pengelolaan parkir sehingga banyak masyarakat pengguna jasa parkir di Pasar Tengah yang komplain akan di terapkannya pembayaran ganda dan tidak jelasnya sistem pembayaran.

4. Evaluasi Proses (*process evaluation*) Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber proses perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan parkir belum sejalan dengan apa yang direncanakan berdasarkan visi dan misi Dinas Perhubungan.
5. Evaluasi manfaat (*outcome evaluation*)
Belum ada manfaat yang diberikan, pengguna jasa parkir tidak puas akan pengelolaan yang diberikan.
6. Evaluasi akibat (*impact evaluation*)
Setelah berjalannya pengelolaan parkir di Pasar Tengah banyak pengguna jasa parkir yang kecewadengan sistem pengelolaan.

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran dari penulis, diantaranya :

1. Dinas Perhubungan seharusnya Membuat SOP agar pengelolaan parkir lebih terarah.
2. Peningkatan kualitas pegawai dan juru parkir UPTD dapat dilakukan dengan sering mengadakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir.
3. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang tidak menjalankan tugasnya dengan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aprilia, Hera. 2009. *Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo dan Gesing, Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.
- Bratakusumah dkk. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Cet.4*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Harmono. 2009. *Manajemen Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hasibuan, dkk. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan : Salemba Humanika.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. cetakan kedua. Yogyakarta : UII Press.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- minudin, Muhammad. 2007. *Evaluasi Rencana Lokasi Pemindahan Terminal Induk Km. 6 Banjarmasin*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Matthew dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Zain. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba empat

- M.Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik*, Yogyakarta : Andi
- Muhammad, Nasir.(1999). *Metode Penelitian kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pamudji. 1985. *Analisis sistem-sistem bagi administrasi yang efektif*. Jakarta : Bina Aska
- Pignataro. 1973. *Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Jakarta : Erlangga.
- Poerwadarmita. 1976. *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Sabarguna, Boy S.,Haji. 2004. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Singarimbun,dkk. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- S.H Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. cetakan pertama. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Suharsimi Arikunto, Cipi Safruddin Abdul. 2014. *Evaluasi program pendidikan*. Cetakan kedua. Bandung : Mitra Ahmad.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sukanto. 1989. *Anak dan Pengelolaannya*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Sukardi. 2014. *Evaluasi program kependidikan dan kepelatihan*. Jakarta : Bumi Aska
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan-* Ed.1,Cet.1. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Terry. 2006. *Prinsip-Prinsip Menejemen*. Jakarta : Bumi Aska.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wijayanti, Irine Diana Sari Se,Mm. 2008. *Manajemen*. Jogyakarta : MITRA CENDIKIA offset.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi teori, model, standar, aplikasi*. Edisi Revisi. Depok : Rajawali Pers.

Jurnal:

Clara Yolanda. 2016. *Kebijakan Pemerintah Kota Metro Dalam Pengalihfungsian Jalan Umum Menjadi Lahan Parkir*. (Jurnal). Universitas Lampung.

Jazuli Wijaya. (2011) *Analisis Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung*. (Tesis). Universitas Lampung.

Maulana Rendri Yuda dkk. 2015. *Studi Optimalisasi Fasilitas Parkir di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung*, (jurnal). Universitas Lampung Vol. 3, No. 3, Hal:469 – 482.

Riski Atika Sari. (2017) *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Metro (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Metro)*. Universitas Lampung.

Rezki Anantama. (2015). *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Bandar Lampung 2015)*. Universitas Lampung.

Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan pemerintah.

PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

PP No.43 tahun 1993, mengatur tentang lalu lintas jalan.

Peraturan Wali Kota Nomor 47 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran.

PERDA No.07 tahun 2008, Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Website :

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-retribusi-parkir.html> diakses pada tanggal 20 juli 2018 pukul 19.30 wib

<http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html> diakses pada tanggal 18 mei 2018 Pukul 14:50 WIB

<https://www.neliti.com/id/publications/195526/efektivitas-dan-kontribusi-penerimaan-retribusi-parkir-terhadap-pendapatan-asli> diakses pada 10 mei 2018 pukul 20:15 WIB

www.jejam0.com/pungli-parkir-pasar-tengah-bandar-lampung-mencapai-rp-225-juta-per-bulan-ini-perhitungannya.html diakses pada tanggal 28 mei 2018 pukul 19.10 wib.

<https://goenable.wordpress.com/tag/konsep-evaluasi/> diakses pada tanggal 08 agustus 2018 pukul 20.20 wib

<http://duajurai.co/2016/08/29/lahan-parkir-pasar+tengah+terkait+lahan> diakses pada 28 mei 2018 pikul 19.40 wib

<http://ekstranews.com/2018/05/praktik-penarikan-biaya-parkir-dobel-di-pasar-tengah-belum-berakhir/> diakses 03 Desember 2018